



# **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

**2023**

SEKRETARIAT  
DIREKTORAT  
JENDERAL  
PENDIDIKAN  
VOKASI



**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN VOKASI  
2023**



**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat serta karunia-Nya, Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2023 telah selesai disusun guna menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi yang telah disusun ini merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang mengacu pad Renstra dan Renja Satuan Kerja untuk perencanaan satu tahun. Target kinerja tahunan ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada. Target kinerja ini merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini dilakukan secara bersama-sama melibatkan pihak-pihak terkait dengan mempertimbangkan semua masukan yang ada. Rencana Kinerja Tahunan ini telah memuat Sasaran dan Indikator Kinerja yang terdapat dalam Renstra, serta memuat program/kegiatan, rencana Rincian Output dan rencana anggaran berdasarkan pagu alokasi.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama atas setiap indikator yang akan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan akuntabilitas Kementerian.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan ini dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek dalam mencapai visi dan misi Kemendikbudristek, yang sekaligus mendorong pencapaian Visi Presiden pada 2020-2024 dan Visi Indonesia 2045.

Jakarta, April 2022

Sekretaris,



Dr. Wartanto

NIP 196310091989031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi .....	4
D. Rencana Kinerja Tahunan .....	8
<b>BAB II Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan .....</b>	<b>11</b>
A. Proses Perencanaan Anggaran 2023 .....	11
B. Proses Bisnis Penyusunan RKT 2023 .....	12
C. Penggunaan Aplikasi ePlanning - RKT oleh Satuan Kerja .....	14
<b>BAB III Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi 2023 ...</b>	<b>15</b>
A. Capaian Kinerja Setditjen Diksi 2020-2021 .....	15
B. Realisasi Anggaran Setditjen Diksi 2020-2021 .....	16
C. Rencana Kinerja Tahunan Setditjen Diksi 2023.....	18
D. Manajemen Resiko .....	28
<b>BAB IV Kesimpulan dan Tindak Lanjut .....</b>	<b>31</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>32</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terdiri atas: a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi; b) Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan; c) Direktorat Kursus dan Pelatihan; d) Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi; e) Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi; f) Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

Melalui Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Pendidikan Vokasi, telah disusun arah kebijakan, program, kegiatan, output dan outcome Ditjen Pendidikan Vokasi dalam kurun waktu 2020-2024. Renstra tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan program, arah dan kebijakan Ditjen Pendidikan Vokasi dengan mengoptimalkan manajemen yang akuntabel, efektif dan efisien. Karena itu, baik satker pusat maupun satker daerah di lingkungan Direktorat jenderal Pendidikan Vokasi bersama-sama mendukung kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

Sebagai salah satu Satker pusat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendukung terwujudnya kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dengan mengemban tugas dan fungsinya sesuai amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai Satker Pusat yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan tinggi vokasi, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri, perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bentuk perwujudan dari penguatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sistem akuntabilitas kinerja adalah rangkaian sistematis dari berbagai komponen, alat dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan laporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian yang terintegrasi dengan penerapan anggaran berbasis kinerja, yang mengharuskan unit kerja menyusun anggaran dengan mengacu pada target kinerja yang akan dicapai, dan seluruh anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya (outcome). Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dikeluarkan harus dapat dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari lima aspek utama yaitu perencanaan kinerja, pengukuran capaian kinerja, pelaporan kinerja, reviu laporan kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Tahapan dalam melakukan proses perencanaan kinerja ada empat. Pertama, menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang disusun oleh satuan kerja, mengacu pada Renstra Kementerian. Kedua, menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang mengacu pada Renstra dan Renja Satuan Kerja untuk Perencanaan tahun berikutnya (T+1). Memuat Sasaran dan Indikator Kinerja yang terdapat dalam Renstra, serta memuat program/kegiatan, rencana Rincian Output, dan rencana anggaran berdasarkan pagu indikatif.

Tahapan perencanaan yang ketiga yaitu menyusun Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang diperjanjikan oleh Pimpinan Satker dengan Pimpinan di atasnya sesuai tahun berjalan (T=0). Keempat, penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) yang merupakan dokumen rencana capaian atas Perjanjian Kinerja berbasis triwulan. Renaksi menggambarkan rencana Satker dalam upaya pencapaian target kinerja yang diperjanjikan.



Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. RKT menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Penyusunan RKT untuk Satker di lingkungan Kemendikbudristek dilakukan di bawah koordinasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek. Penyusunan RKT tahun 2023 yang dilakukan pada tahun 2022 ini melalui 3 tahapan.

Tahap pertama dilakukan sosialisasi RKT bagi Satker di lingkungan Kemendikbudristek yang dilanjutkan dengan input penyesuaian baseline melalui aplikasi *e-planning*. Tahap terakhir yaitu penarikan data oleh Biro Perencanaan sebagai dasar penyusunan RKT Satker 2023.

### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

## C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Struktur Organisasi merupakan perwujudan yang menunjukkan hubungan di antara fungsi-fungsi dalam suatu organisasi serta wewenang dan tanggung jawab setiap anggota organisasi yang menjalankan masing-masing tugasnya.

Berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi disebutkan bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Setditjen Diksi) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 tersebut Setditjen Pendidikan Vokasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan tinggi vokasi, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri;
- b. pengumpulan dan analisis data dan informasi di bidang pendidikan tinggi vokasi, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan tinggi vokasi, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri;
- d. koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan Direktorat Jenderal;





- e. penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal;
- h. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan tinggi vokasi, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri;
- i. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan tinggi vokasi, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Jenderal.

Selengkapnya, struktur organisasi di lingkungan Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi tersaji dalam gambar berikut ini.



Gambar 1  
Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi



Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, dimana Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Jenderal.

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

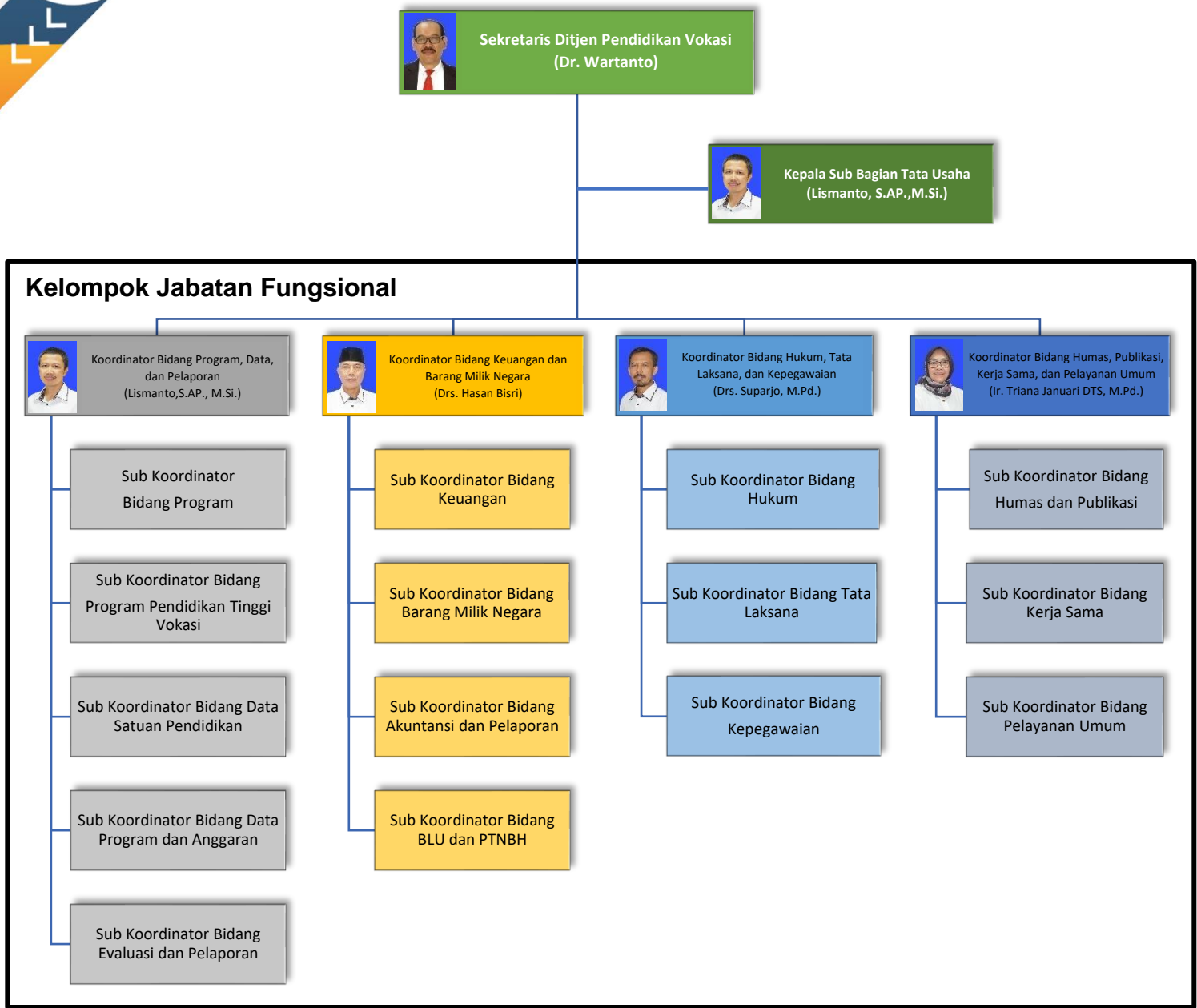
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi, Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam 4 Bidang, yaitu: Bidang Data, Program, Pelaporan, dan PTV; Bidang Keuangan dan Barang Milik Negara; Bidang Hukum dan Tatalaksana; serta Bidang Humas, Publikasi, Kerja Sama, dan Pelayanan Umum.

Masing-masing Bidang dikoordinatori oleh satu orang Pejabat Fungsional yang dibantu oleh subkoordinator pada setiap sub bidang.

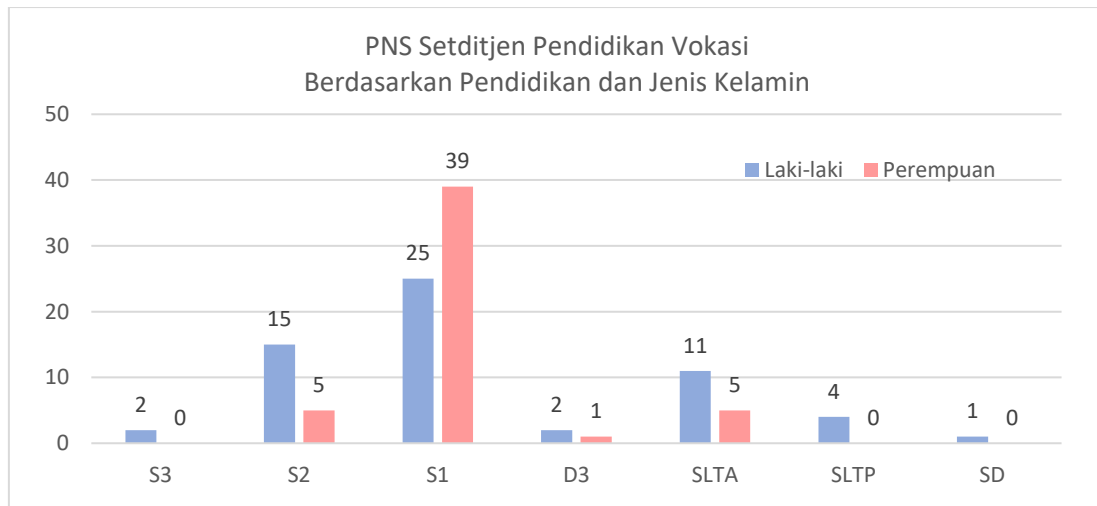
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi membagi tugas dan fungsinya ke dalam koordinator bidang dan sub koordinator bidang seperti yang tersaji dalam gambar berikut ini:



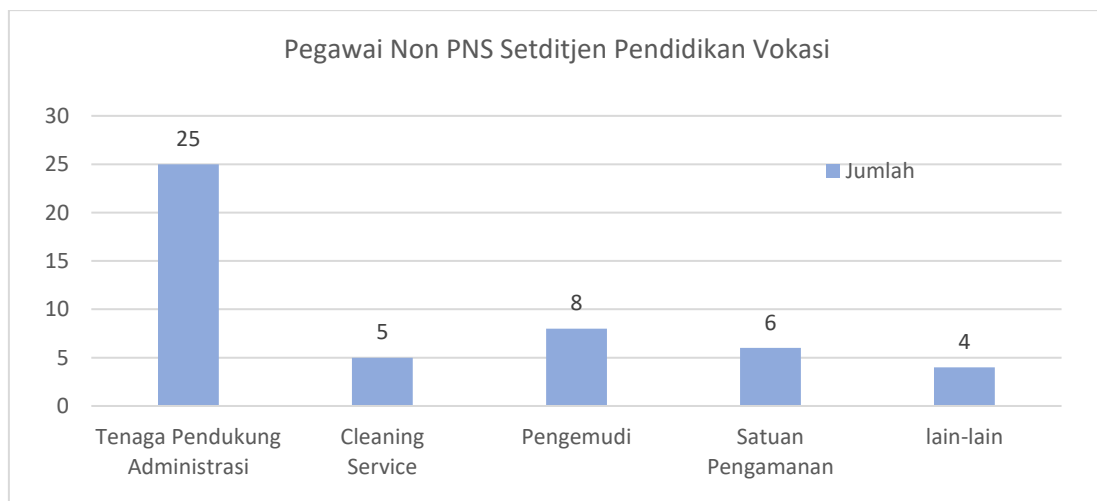


Gambar 2  
Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, jumlah Sumber Daya Manusia di Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebanyak 110 PNS. Dengan rincian 60 PNS Laki-laki dan 50 PNS Perempuan. Selain itu, juga terdapat 48 Pegawai Non PNS sebagai Tenaga Pendukung Administrasi, Cleaning Service, Pengemudi, Satuan Pengamanan, dan lain-lain.



Gambar 3  
PNS Setditjen Pendidikan Vokasi Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin



Gambar 4  
Pegawai Non PNS Setditjen Pendidikan Vokasi

#### D. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. RKT menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Informasi yang termuat dalam RKT antara lain :sasaran, indikator kinerja, target kinerja, program/kegiatan, rincian output, target rincian output dan anggaran. Dengan dirumuskannya RKT akan terlihat keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan



kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, selain itu akan terlihat juga keselarasan dengan Renstra.

Rencana Kinerja Tahunan UPT/Satuan Kerja, merupakan dokumen rencana tahunan sebagai penjabaran dari Renstra unit eselon I dan rencana strategis satuan kerja, yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan target kinerja dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, program, output/kegiatan, indikator output/kegiatan, target output/kegiatan dan perencanaan anggaran dari masing-masing indikator kinerja. Berikut contoh formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT):

Tabel 1. Contoh Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

RENCANA KINERJA TAHUNAN						
TAHUN : ...						
UNIT KERJA : ...						
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET RO	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
Diisi dengan rumusan sasaran sesuai dengan renstra	Diisi dengan rumusan indikator kinerja sesuai dengan renstra	Diisi dengan target tahun berjalan sesuai dengan renstra	Diisi dengan nama program/kegiatan	Diisi dengan rincian output kegiatan yang akan dilaksanakan	Diisi dengan target yang akan dicapai di masing-masing rincian output	Diisi dengan usulan anggaran di masing-masing ouput/kegiatan



Tabel 2. Ilustrasi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Formulir Renstra															
Visi	Misi	Tujuan Strategis (Indikator Tujuan dan target Tujuan)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Baseline (Tahun ke-1)-1						Rencana Anggaran				
						Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

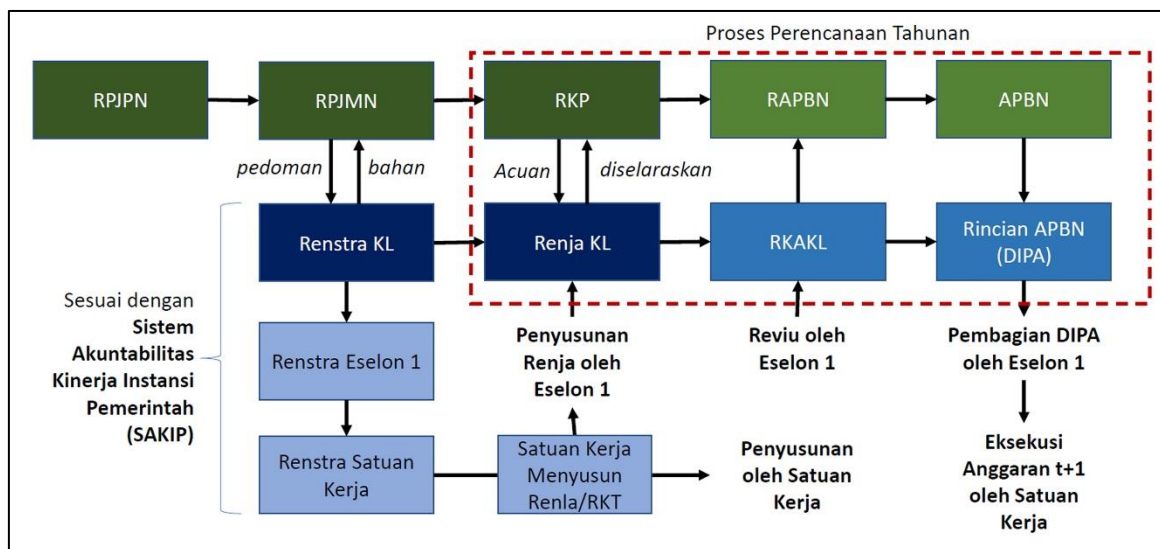
Formulir RKT						
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	PROGRAM/ KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	TARGET RO	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
Diisi dengan rumusan sasaran sesuai dengan renstra	Diisi dengan rumusan indikator kinerja sesuai dengan renstra	Diisi dengan target tahun berjalan sesuai dengan renstra	Diisi dengan nama program/ kegiatan	Diisi dengan rincian output kegiatan yang akan dilaksanakan	Diisi dengan target yang akan dicapai di masing-masing rincian output	Diisi dengan usulan anggaran di masing-masing ouput/kegiatan



**BAB II**  
**PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN**

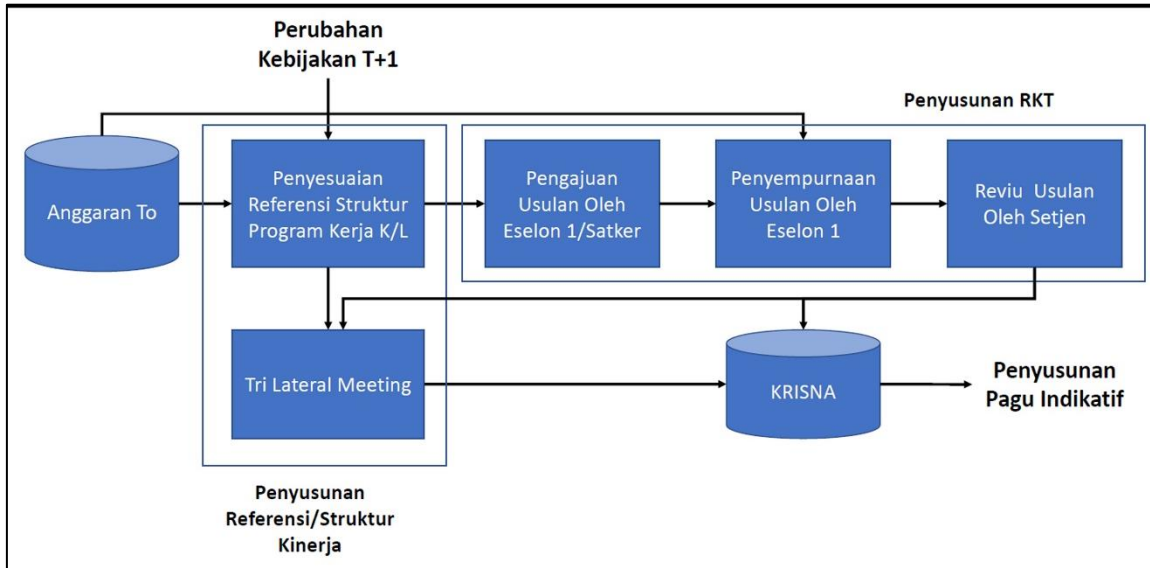
**A. Proses Perencanaan Anggaran 2023**

1. Sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bentuk implementasi Renstra di tingkat Satuan Kerja maka pada proses perencanaan tahunan satuan kerja terlibat mulai dari tahap awal sebagai proses perencanaan bottom up dengan mengajukan usulan awal kebutuhan awal anggaran kepada eselon 1.
2. Usulan Satker akan berfungsi sebagai referensi penyempurnaan estimasi kebutuhan anggaran yang telah disusun pada tahun t 1 yang selanjutnya akan direview Bersama dengan Kementerian PPN/ Bappenas dan Kemkeu
3. Proses perencanaan oleh satuan kerja akan dilakukan melalui aplikasi ePlanning - RKT yang telah dikembangkan oleh Biro Perencanaan dan terintegrasi dengan aplikasi Krisna Renja Bappenas



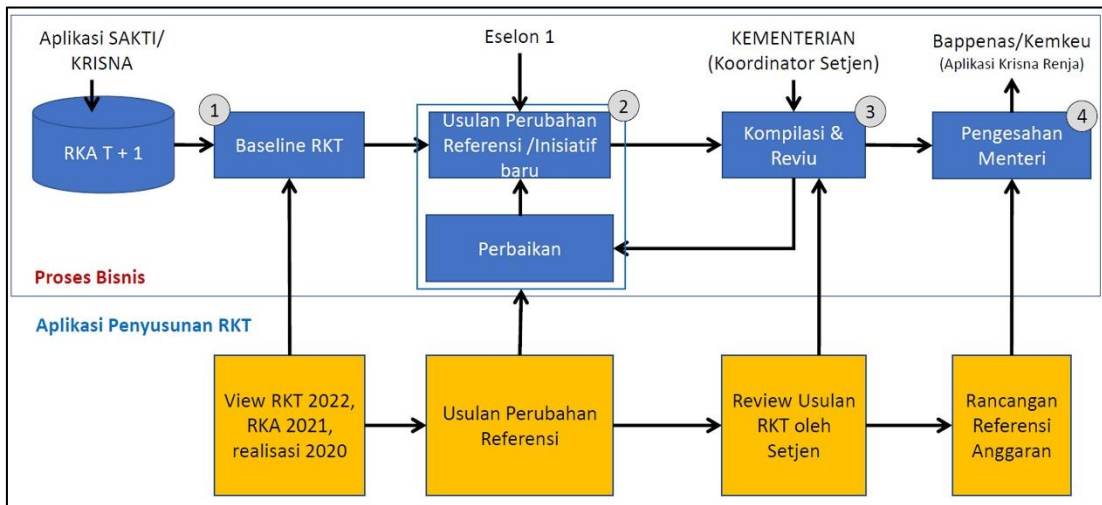
Gambar 5  
Proses Perencanaan Anggaran Tahun 2023

**B. Proses Bisnis Penyusunan RKT 2023**



Gambar 6  
Proses Bisnis Penyusunan RKT

1. Perubahan Referensi



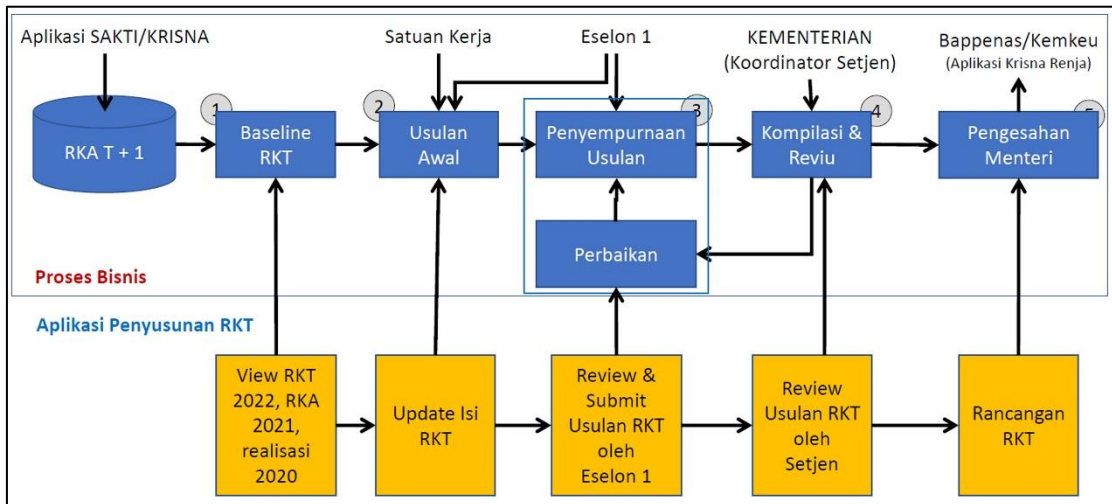
Gambar 7  
Perubahan Referensi Proses Penyusunan RKT

Proses penyusunan rencana kerja dan kebutuhan anggaran awal oleh satuan kerja dilakukan dengan menggunakan struktur program kerja sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2022. Perubahan struktur hanya dapat diajukan melalui eselon 1.





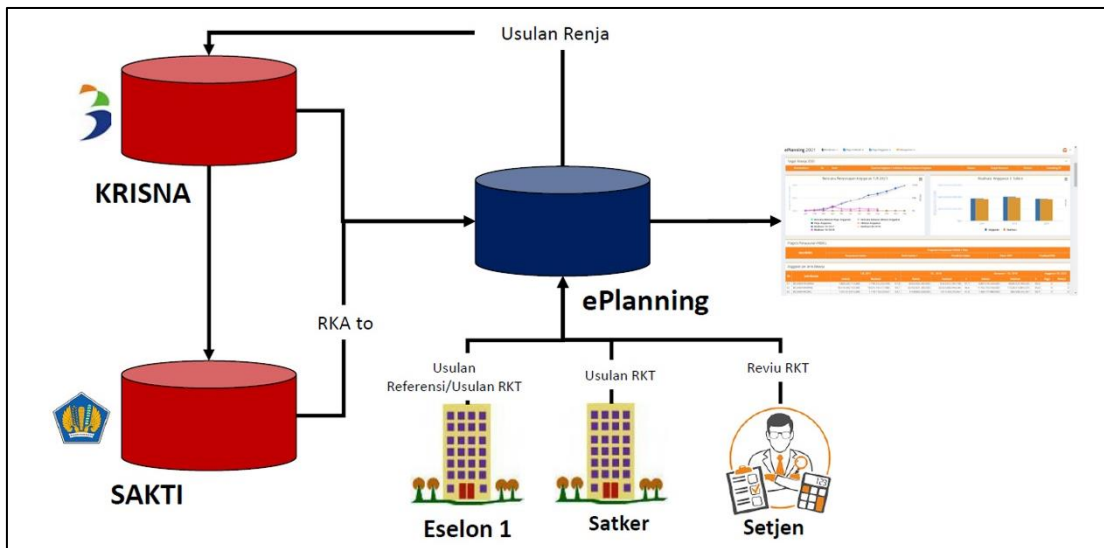
## 2. Penyusunan RKT



Gambar 8  
Proses Penyusunan RKT Tahun 2023

Usulan Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran satuan kerja akan dijadikan masukan untuk menyempurnakan Baseline kebutuhan anggaran tahun 2023 yang telah disusun pada tahun 2021.

## 3. Alur Data

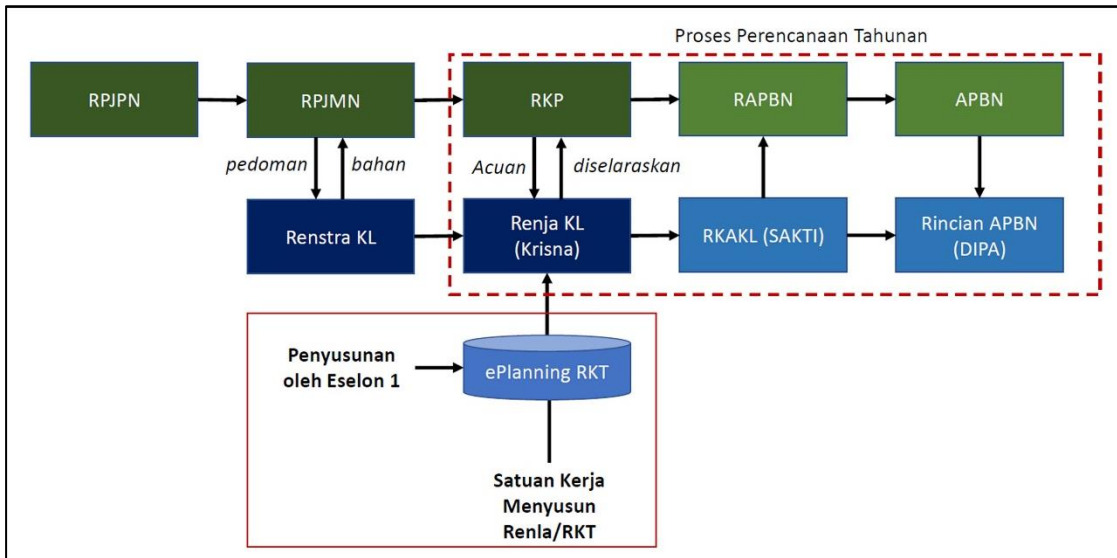


Gambar 9  
Proses penyusunan usulan Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran oleh Satker menggunakan basis data RKA 2022 yang berasal dari aplikasi Sakti.

**C. Penggunaan Aplikasi ePlanning - RKT oleh Satuan Kerja**

Penyusunan RKT untuk Satker di lingkungan Kemendikbudristek dilakukan di bawah koordinasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek. Penyusunan RKT tahun 2023 yang dilakukan pada tahun 2022 ini melalui 3 tahapan.

Tahap pertama dilakukan sosialisasi RKT bagi Satker di lingkungan Kemendikbudristek yang dilanjutkan dengan input penyesuaian baseline melalui aplikasi *e-planning*. Tahap terakhir yaitu penarikan data oleh Biro Perencanaan sebagai dasar penyusunan RKT Satker 2023.



Gambar 10  
Proses Penyusunan RKT oleh Satker melalui e-Planning RKT

**BAB III**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN**  
**SEKRETARIAT DITJEN PENDIDIKAN VOKASI**  
**2023**

**A. Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi 2020-2021**

Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi yang merupakan Satker baru yang dibentuk pada tahun 2020, secara umum mampu memenuhi setiap target kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada setiap tahunnya.

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi kinerja dan capaian atas target kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya.

Pada tahun 2021, telah dilakukan pengukuran capaian kinerja Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi yang direalisasikan selama tahun 2020. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2020, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menetapkan satu sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja beserta target kinerja dan target anggaran yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang dalam perealisasiannya didukung oleh kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi. Berikut tingkat ketercapaiannya selama tahun 2020.

*Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Setditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2020*

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
<b>Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi</b>	<b>IKK 1</b> Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB	100%
	<b>IKK 2</b> Jumlah Satker yang dibina menuju predikat ZIWBK/WBBM	9	13	144,44%
	<b>IKK 3</b> Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	93	95,64	102,84%
<b>Capaian Rata-rata</b>			<b>115,76%</b>	



Pengukuran Capaian Kinerja Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi yang direalisasikan selama tahun 2021 telah dilakukan pada awal tahun 2022. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menetapkan satu sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja kegiatan (IKK) beserta target kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dalam perealisasiannya didukung oleh kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi. Berikut tingkat ketercapaiannya selama tahun 2021.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Setditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	
<b>Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi</b>	<b>IKK 1</b>	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB	100%
	<b>IKK 2</b>	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZIWBK/WBBM	5	8	160%
	<b>IKK 3</b>	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	93,5	94,57	101,13%
			<b>Capaian Rata-rata</b>	<b>120,38%</b>	

## B. Realisasi Anggaran Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi 2020-2021

Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi diberikan pagu anggaran untuk merealisasikan target kinerja yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam perjanjian kinerja antara Sekretaris Ditjen Pendidikan Vokasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi pada setiap tahunnya.

Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dalam DIPA tahun 2020 sebesar Rp 152.382.911.000,00. Dari pagu anggaran tersebut tidak terdapat blokir anggaran. Pagu anggaran tersebut telah berhasil direalisasikan sebesar Rp 144.360.404.029,00 dengan persentase daya serap sebesar 94,74%.

Pagu anggaran sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 1 Sasaran Strategis dengan 3 Indikator Kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.



Tabel 5. Realisasi anggaran Setditjen Pendidikan Vokasi dengan sumber data SP2D (MoLK)  
Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Sisa Anggaran
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	29.778.104.000	27.123.784.858	91,09	2.654.319.142
	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang Dibina Menuju Predikat ZIWBK/WBBM	48.424.468.000	48.001.812.028	99,13	422.655.972
	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	15.417.559.000	13.302.851.374	86,28	2.114.707.626
Anggaran Belanja Rutin		58.762.780.000	55.931.955.769	95,18	2.830.824.231
<b>Jumlah</b>		<b>152.382.911.000</b>	<b>144.360.404029</b>	<b>94,74</b>	<b>8.022.506.971</b>

Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dalam DIPA tahun 2021 sebesar Rp110.162.730.000,00. Dari pagu anggaran tersebut sudah tidak terdapat blokir. Berdasarkan sumber data SP2D (SAS), Setditjen Pendidikan Vokasi telah berhasil merealisasikan anggaran sebesar sebesar Rp109,584,360,708,00 dengan persentase realisasi sebesar 99,63%. Akan tetapi setelah dilakukan pengembalian belanja, realisasi anggaran Setditjen Pendidikan Vokasi berdasarkan sumber data SP2D (OMSPAN) berubah menjadi sebesar Rp109.754.672.957,00. Sehingga persentasenya menjadi 99,47%.

Pagu anggaran sebesar Rp110.162.730.000,00 tersebut, pada tahun 2021 digunakan untuk membiayai pencapaian 1 Sasaran Strategis dengan 3 Indikator Kinerja. Selain itu, Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Tabel 6. Realisasi anggaran Setditjen Pendidikan Vokasi dengan sumber data SP2D (SAS)  
Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Sisa Anggaran
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	11.876.570.000	11.828.984.580	99,60	47.585.420
	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZIWBK/WBBM	30.625.396.000	30.604.521.810	99,93	20.874.190
	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	15.396.094.000	15.392.934.886	99,98	3.159.114
Anggaran Belanja Rutin		52.264.670.000	51.928.231.681	99,36	336.438.319
<b>Jumlah</b>		<b>110.162.730.000</b>	<b>109.754.672.957</b>	<b>99,63</b>	<b>408.057.043</b>

Penyerapan anggaran ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi merupakan satker baru pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 4,89%. Pada tahun 2020, Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi dapat merealisasikan anggaran sebesar 94,74%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi anggarannya mencapai sebesar 99,63%.



Gambar 11  
Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2021

### C. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi 2023

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengawali tahapan perencanaan dengan menentukan tujuan/sasaran, dilanjutkan dengan mengukur tujuan/sasaran, menentukan target, dan mengaitkan tujuan/sasaran tersebut dengan program dan kegiatan yang memiliki hasil dan dampak yang jelas bagi perbaikan pelayanan publik, *performance-based budgeting* atau anggaran berbasis kinerja.

Untuk tahun anggaran 2022, terdapat dua Sasaran Kegiatan (SK) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024 yang telah direvisi, yaitu Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dan Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.

Sasaran Kegiatan Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi didukung oleh indikator kinerja kegiatan (IKK)



Persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II beserta target kinerja dan target anggaran yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dalam perealisasiannya didukung oleh kegiatan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi.

Sasaran Kegiatan Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi didukung oleh 2 indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB dan Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM. Kedua IKK tersebut disertai juga dengan target kinerja dan target anggaran yang harus dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dalam perealisasiannya kedua IKK tersebut didukung oleh kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi.

Tabel 7. Sasaran dan Indikator Kinerja Tingkat Kementerian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi
2	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel	Predikat SAKIP Kemendikbudristek Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

Tabel 8. Sasaran dan Indikator Kinerja Tingkat Unit Eselon I

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi
2	Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi
		Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM



Tabel 9. Sasaran dan Indikator Kinerja Tingkat Satuan Kerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1	Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi	Persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II
2	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB
		Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM

Sasaran satuan kerja merupakan turunan dari sasaran unit kerja di atasnya, mulai dari sasaran tingkat kementerian dan sasaran di tingkat unit Eselon I. Rumusan sasaran menyesuaikan dengan tingkatannya tetapi tetap selaras dengan rumusan unit kerja atasannya namun indikator kinerja dan targetnya berubah serta menyesuaikan.

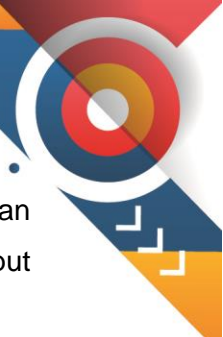
Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menetapkan target tahunan yang akan dicapai beserta rencana kebutuhan anggarannya, sebagai berikut:





Tabel 10. Target dan Rencana Kebutuhan Anggaran Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/ Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)		
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang								
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	30,85	31,52	36,64	37,63			
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel								
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Predikat	BB	BB	A	A			
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Indeks	78	83	85	87			
<b>Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi</b>									
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi								
IKP 1.5.1	Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	7,93	12,95	15,47	17,98	328.892	338.759	348.921
4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi								
SK	Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi								
IKK 1.5.1.1	Persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II	%	10	10	10	10	328.892	338.759	348.921
<b>Program Dukungan Manajemen</b>									
SP	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi								
IKP 5.3.7	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A	A	A	A	135.034	135.034	135.034
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi								
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi								
IKK 5.3.7.1	Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	46,15	66,46	79,75	96	72.292	72.292	72.292
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek								
IKP 5.4.6	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	7	16	26	46	2.331.770	2.401.723	2.473.775
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi								
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi								
IKK 5.4.6.1	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	6	20	25	30	55.785	55.785	55.785



Setelah melakukan proses penyusunan usulan Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran menggunakan basis data RKA 2022 yang berasal dari aplikasi Sakti, dilanjutkan dengan input penyesuaian baseline melalui aplikasi *e-planning*.

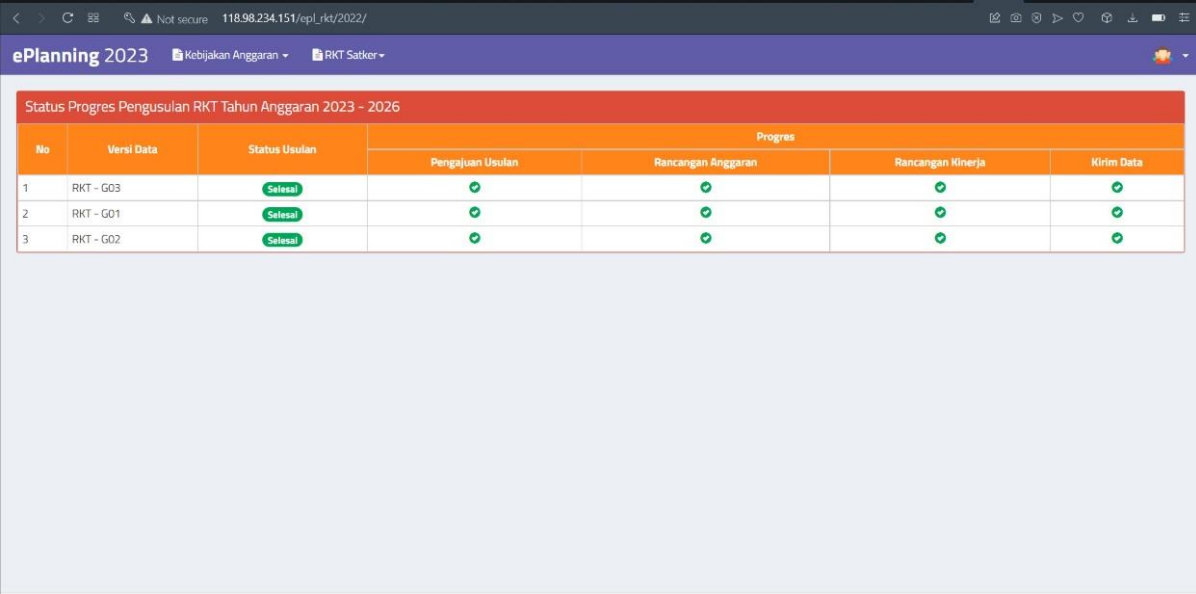
No	Nomenklatur	Kode	Nama Satker / Unit / Program / Kegiatan / KRO / Rincian Output / Komponen / Sumber Dana	Satuan	TA. 2023		TA.2024	
					Volume	Alokasi	Volume	Alokasi
1	Satker	677591	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI			466.837.068		483.775.002
2	Unit	18	DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI			466.837.068		483.775.002
3	Program	18.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			338.758.676		355.696.610
4	Kegiatan	4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi			338.758.676		355.696.610
5	Sasaran	4466.01	Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi					
6	Indikator	4466.01.01	Persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II	%	10		10	
7	KRO	4466.BEI	Bantuan Lembaga	Lembaga	240	338.758.676	240	355.696.610
8	RO	4466.BEI.001	Dukungan Operasional PTN (BOPTN Vokasi)	Lembaga	46	101.413.200	46	106.483.860
9	Komponen	4466.BEI.001-004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			101.413.200		106.483.860
10	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			101.413.200		106.483.860
11	RO	4466.BEI.002	Layanan Pembelajaran (BOPTN Vokasi)	Lembaga	49	138.427.435	49	145.348.807
12	Komponen	4466.BEI.002-004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			138.427.435		145.348.807
13	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			138.427.435		145.348.807
14	RO	4466.BEI.003	Buku Pustaka (BOPTN Vokasi)	Lembaga	22	3.850.036	22	4.042.538
15	Komponen	4466.BEI.003-004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			3.850.036		4.042.538
16	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			3.850.036		4.042.538
17	RO	4466.BEI.004	Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN Vokasi)	Lembaga	45	37.945.944	45	39.843.241
18	Komponen	4466.BEI.004-004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			37.945.944		39.843.241
19	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			37.945.944		39.843.241
20	RO	4466.BEI.005	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN Vokasi)	Lembaga	34	20.615.247	34	21.646.009
21	Komponen	4466.BEI.005-004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			20.615.247		21.646.009
22	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			20.615.247		21.646.009
23	RO	4466.BEI.006	Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN Vokasi)	Lembaga	44	36.506.814	44	38.332.155
24	Komponen	4466.BEI.006-004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			36.506.814		38.332.155
25	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			36.506.814		38.332.155
26	Program	18.WA	Program Dukungan Manajemen			128.078.392		128.078.392
27	Kegiatan	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi			128.078.392		128.078.392
28	Sasaran	4261.02	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi					



# >>> Rencana Kinerja Tahunan 2023

No	Nomenklatur	Kode	Nama Satker / Unit / Program / Kegiatan / KRO / Rincian Output / Komponen / Sumber Dana	Satuan	TA. 2023		TA.2024	
					Volume	Alokasi	Volume	Alokasi
29	Indikator	4261.02.01	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	25		30	
30	Sasaran	4261.03	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi					
31	Indikator	4261.03.01	Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	79,75		96	
32	KRO	4261.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	2	128.078.392	2	128.078.392
33	RO	4261.EBA.962	Layanan Umum	Layanan	1	72.292.795	1	72.292.795
34	Komponen	4261.EBA.962-051	Penyusunan Penelaahan dan Revisi Program dan Anggaran			5.444.566		5.444.566
35	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			5.444.566		5.444.566
36	Komponen	4261.EBA.962-052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Anggaran dan Kegiatan			4.282.084		4.282.084
37	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			4.282.084		4.282.084
38	Komponen	4261.EBA.962-053	Pengelolaan Data dan Informasi			7.615.126		7.615.126
39	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			7.615.126		7.615.126
40	Komponen	4261.EBA.962-054	Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan			5.400.019		5.400.019
41	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			5.400.019		5.400.019
42	Komponen	4261.EBA.962-055	Pelayanan Pengelolaan BMN			3.264.809		3.264.809
43	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			3.264.809		3.264.809
44	Komponen	4261.EBA.962-056	Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal			6.250.462		6.250.462
45	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			6.250.462		6.250.462
46	Komponen	4261.EBA.962-057	Organisasi dan Tata Laksana			3.379.411		3.379.411
47	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			3.379.411		3.379.411
48	Komponen	4261.EBA.962-058	Pengadaan Penataan dan Peningkatan Kompetensi Pegawai			4.080.653		4.080.653
49	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			4.080.653		4.080.653
50	Komponen	4261.EBA.962-059	Pelayanan Umum			1.579.302		1.579.302
51	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			1.579.302		1.579.302
52	Komponen	4261.EBA.962-060	Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Instansi/Lembaga			5.740.090		5.740.090
53	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			5.740.090		5.740.090
54	Komponen	4261.EBA.962-061	Pelayanan Humas dan Protokoler			16.588.543		16.588.543
55	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			16.588.543		16.588.543
56	Komponen	4261.EBA.962-063	Ketatausahaan			6.142.530		6.142.530
57	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			6.142.530		6.142.530
58	Komponen	4261.EBA.962-064	Pembinaan BLU dan PTNBH			2.525.200		2.525.200
59	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			2.525.200		2.525.200
60	RO	4261.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	55.785.597	1	55.785.597
61	Komponen	4261.EBA.994-001	Gaji dan Tunjangan			16.574.487		16.574.487
62	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			16.574.487		16.574.487
63	Komponen	4261.EBA.994-002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			39.211.110		39.211.110
64	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			39.211.110		39.211.110

Status progress pengusulan RKT Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun Anggaran 2023-2026 pada aplikasi ePlanning.



No	Versi Data	Status Usulan	Progres			
			Pengajuan Usulan	Rancangan Anggaran	Rancangan Kinerja	Kirim Data
1	RKT - G03	Selesai	✓	✓	✓	✓
2	RKT - G01	Selesai	✓	✓	✓	✓
3	RKT - G02	Selesai	✓	✓	✓	✓

Gambar 12  
Status Progress pengusulan RKT Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi pada aplikasi ePlanning

## 1. Sasaran Kegiatan 1

**Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi**

### a. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 1.1

**Persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II**

Mahasiswa yang dimaksudkan pada Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi Vokasi.

Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran (Permendikbud 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan).

Besaran UKT ditetapkan oleh pemimpin PTN bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana dari setiap jalur penerimaan Mahasiswa. Besaran UKT bagi Mahasiswa program diploma dan program sarjana terbagi dalam beberapa kelompok.



- 1) kelompok I dengan besaran UKT paling tinggi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- 2) kelompok II dengan besaran UKT paling rendah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah) dan paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Penetapan kelompok besaran UKT dan Mahasiswa dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi:

- 1) mahasiswa;
- 2) orang tua Mahasiswa; atau
- 3) pihak lain yang membiayai Mahasiswa.

Penetapan kemampuan ekonomi dilakukan berdasarkan pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga dari Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa. Ketentuan mengenai tata cara penetapan kelompok besaran UKT dan Mahasiswa ditetapkan oleh pemimpin PTN.

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah sebesar 10% setiap tahunnya. Target tersebut besarnya setiap tahunnya tetap, tidak berubah. Persentase tersebut diperoleh dari jumlah keseluruhan mahasiswa DI-DIV/S1 Terapan di Perguruan Tinggi Negeri Vokasi yang merupakan kelompok UKT I dan II dibagi dengan jumlah keseluruhan mahasiswa DI-DIV/S1 Terapan di Perguruan Tinggi Negeri Vokasi.

Jumlah keseluruhan mahasiswa DI-DIV/S1 Terapan di Perguruan Tinggi Negeri Vokasi yang merupakan kelompok UKT I dan II dapat ditelusuri dari SK Penetapan Penerima UKT Kelompok I dan II (Politeknik Negeri dan AKN). SK Penetapan Penerima UKT Kelompok I dan II tersebut berisikan data jumlah mahasiswa kelompok UKT I dan II lengkap dengan rinciannya. Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi sebagai unit utama yang bertugas sebagai pengampu Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi, mengkoordinasi pengumpulan data capaian IKK tersebut secara berkala dan memastikan validitas data yang disampaikan oleh Politeknik dan AKN.



2. Sasaran Kegiatan 2

**Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi**

a. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2.1

**Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB**

Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 88 Tahun 2021, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

*Tabel 12. Kategori Hasil Penilaian SAKIP*

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (Memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Sedangkan pemberian Nilai SAKIP didasarkan pada 4 komponen penilaian sebagai berikut:

*Tabel 13. Komponen dan Bobot Penilaian SAKIP*

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	30%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	25%
Total Nilai	100%



Rata-rata predikat SAKIP Satker dihitung dari perolehan skor SAKIP dari setiap satker di lingkungan unit utama. Rata-rata SAKIP dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Perhitungan persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB dilakukan dengan menghitung jumlah satker yang mendapatkan nilai BB untuk dibagi dengan jumlah total keseluruhan satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi. Nilai untuk masing-masing satker dapat diketahui dari hasil evaluasi SAKIP pada akhir tahun anggaran atau pada triwulan IV.

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan ini pada tahun 2023 adalah sebesar 79,75% atau sebanyak 50 satker yang mendapatkan nilai BB. Target ini naik dari target tahun 2022 sebesar 66,46% atau sebanyak 42 satker. Sedangkan untuk target pada tahun 2024 menjadi sebesar 96% atau sebanyak 60 satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi yang mendapatkan nilai BB.

**b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 2.1**

**Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM**

Satker (Satuan Kerja) di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi terdiri dari Setditjen, Dit SMK, Dit. Kursus dan Pelatihan, Dit. Mitras DUDI, Dit Akademik PTV, Dit. Kelembagaan dan Sumberdaya PTV, 6 BBPPMPV, 1 BPPMPV, 44 Politeknik dan 5 AKN.

Indeks reformasi birokrasi adalah penyimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi. Penilaian dilakukan oleh Menteri PAN RB dan hasil akan diumumkan pada Desember tahun berjalan.

WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang mencapai indeks reformasi birokrasi paling sedikit 75. WBBM adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang mencapai indeks reformasi birokrasi paling sedikit 85.

Indeks capaian reformasi birokrasi minimum 75 adalah batas nilai minimum untuk mendapatkan predikat Zona Integritas Menuju WBK sesuai dengan ketentuan PermenpanRB Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan PermenpanRB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Indeks capaian reformasi birokrasi minimum 85 adalah batas nilai minimum untuk mendapatkan predikat Zona Integritas Menuju WBBM sesuai dengan ketentuan PermenpanRB Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan PermenpanRB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Baseline diambil dari jumlah satker di lingkungan Kemendikbud yang berpredikat WBK/WBBM pada tahun 2019.

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan ini pada tahun 2023 adalah sebanyak 25 satker yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK. Target ini naik dari target tahun 2022, yaitu sebanyak 20 satker. Sedangkan untuk target pada tahun 2024 menjadi sebanyak 30 satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.

Target untuk Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak kumulatif, karena satker yang diusulkan belum tentu mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM pada tahun yang sama. Akan ada kemungkinan untuk diusulkan kembali pada tahun berikutnya apabila belum lolos penilaian yang dilakukan oleh KemenPANRB pada bulan Desember tahun berjalan.

#### **D. Manajemen Resiko**

Berdasarkan Permendikbud No. 66 Tahun 2015 tentang Manajemen Resiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menerapkan manajemen risiko.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan Ditjen Pendidikan Vokasi dialokasikan anggaran pada masing-masing satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.





Masing-masing satuan kerja dalam mengelola anggaran tersebut mempunyai risiko yang sama yaitu terjadinya kerugian negara yang akan berdampak kurang baik pada pegawai, pejabat yang diberikan kewenangan maupun satuan kerja. Berkenaan dalam hal pengelolaan anggaran, maka diperlukan prinsip kehati-hatian, pemahaman terhadap peraturan pengelolaan keuangan negara dan komitmen yang kuat dalam menjalankan kewenangan pengelolaan keuangan negara, serta sistem pengendalian internal yang handal pada satuan kerja di semua level.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara serta untuk mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi perlu diterapkan manajemen resiko. Sehubungan dengan hal tersebut, implementasinya perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk melihat komitmen organisasi dalam penerapannya.

Inspektorat I, Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek pada tahun 2021 telah melaksanakan survey atas persepsi manajemen resiko yang melibatkan 650 responden di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Responden tersebut terdiri dari 436 (67%) responden laki-laki dan 214 (33%) responden perempuan.

Responden terdiri dari pejabat struktural, fungsional khusus, dan fungsional umum. Pada kegiatan survey ini, responden mengisi kuesioner yang disampaikan berdasarkan persepsi atas implementasi manajemen resiko di lingkungan kerjanya, setelah sebelumnya memperoleh penjelasan sehubungan dengan tata cara pengisian. Kegiatan tersebut dilakukan dari tanggal 26 Agustus s.d. 8 September 2021, melalui pengisian kuesioner menggunakan tautan pada Google Form.

Secara keseluruhan, tingkat maturitas penerapan manajemen resiko pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menunjukkan skor 3,45 yang berada pada rentang nilai  $2,5 < X \leq 3,5$  dan masuk ke dalam kategori risk defined. Skor tersebut menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memiliki kebijakan, pedoman, implementasi manajemen resiko, dan sudah dikomunikasikan, namun register resikonya belum tersusun secara lengkap dari satuan/unit kerja. Kebijakan dan pedoman tercermin sudah tersedianya Peraturan Menteri tentang Manajemen Resiko (Permendikbud Nomor 66 tahun 2015). Selain itu, register resiko sudah menginformasikan hasil identifikasi resiko, pengukuran, dan rencana penanganan atau respon atas resiko yang teridentifikasi dan terlaksana pada Sebagian unit/satuan kerja.

Secara lebih rinci, berdasarkan skor masing-masing dimensi pada tingkat kematangan manajemen resiko di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tersaji pada table berikut.

*Tabel 14. Hasil Survei Asesmen Maturitas manajemen Resiko Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi*

<b>Dimensi</b>	<b>Skor Penilaian (S)</b>	<b>Bobot Penilaian (R)</b>	<b>Skor Akhir (S*R)</b>
Budaya (Culture)	3,54	40%	1,42
Proses (Process)	3,48	20%	0,70
Pengalaman (Experience)	3,25	20%	0,65
Implementasi (Application)	3,42	20%	0,68
<b>Nilai Maturitas Ditjen Pendidikan Vokasi</b>		100%	<b>3,45</b>



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Penyusunan RKT untuk Satker di lingkungan Kemendikbudristek dilakukan di bawah koordinasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek.

Terdapat dua Sasaran Kegiatan (SK) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020-2024 yang telah direvisi, yaitu Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dan Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.

Setelah melakukan proses penyusunan usulan Rencana Kerja dan Kebutuhan Anggaran menggunakan basis data RKA 2022 yang berasal dari aplikasi Sakti, dilanjutkan dengan input penyesuaian baseline melalui aplikasi *e-planning*.

Setelah menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, telah dilanjutkan dengan penyusunan perjanjian Kinerja antara Sekretaris Ditjen Pendidikan Vokasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Perjanjian Kinerja tersebut disusun pada aplikasi Spasikita Kemendikbudristek dan telah ditandatangani secara elektronik.

Tahapan perencanaan yang harus segera untuk ditindaklanjuti kemudian adalah menyusun rencana aksi. Penyusunan rencana aksi satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek dilakukan di bawah koordinasi Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek. Rencana aksi tersebut akan disusun pada aplikasi Spasikita.

Diharapkan dengan dilakukannya Langkah-langkah perencanaan ini akan berdampak pada peningkatan nilai akuntabilitas kinerja yang juga berimbas kepada peningkatan pelayanan prima oleh Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi baik kepada satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi maupun kepada masyarakat umum.

# LAMPIRAN

1. **Matrik Renstra Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi 2020-2024**
2. **Matrik Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi 2023**
3. **Perjanjian Kinerja 2022**
4. **DIPA 0 Sekretariat Ditjen Pendidikan Vokasi 2022**



Qexvmow\$Omrivne\$her\$Tirhereer\$Xelyr\$6.  
Hmviioxsvex\$Nirhivep\$Tirhmoer\$Zsoewm

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline	Target			Alokasi (dalam juta rupiah)			Unit Pengampu	Sumber Data
			2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024		
SS 1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang										
IKSS 1.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	30,85	31,52	36,64	37,63					BPS
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang										
IKSS 2.6	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan/ berwirausaha dalam 1 tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum 1x UMP	%	36,57	42,77	45	47,77					Sakernas, BPS
SS 4	Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan										
IKSS 4.1	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat	Karya	74.908	82.500	86.500	90.500					PDDIKTI (Dashboard IKU – IKU 5 Gabungan Dikti & Diksi)
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel										
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Predikat	BB	BB	A	A					Surat Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	Indeks	78	83	85	87					Surat Menteri PANRB tentang hasil PMPRB Kemendikbud
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi											
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi										
IKP 1.5.1	Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	7,93	12,95	15,47	17,98	328.892	338.759	348.921	Ditjen Pendidikan Vokasi	PDDIKTI
4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi										
SK	Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi										
IKK 1.5.1.1	Persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II	%	10	10	10	10	328.892	338.759	348.921	Setditjen Vokasi (PTN)	SK Penerima UKT
SP	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja										
IKP 2.6.1	Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	%	33,57	39,18	42,18	46,18	1.907.162	1.968.301	2.031.150	Ditjen Pendidikan Vokasi	Sakernas
4262	Pembinaan SMK										
SK	Meningkatnya kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja										
IKK 2.6.1.1	Persentase lulusan SMK yang berhasil memperoleh kompetensi yang sesuai dengan dunia kerja	%	20	33	36	40	24.517	25.252	26.010	Dit. SMK	Dapodik, Laporan Internal
SK	Meningkatnya relevansi pembelajaran SMK dengan kebutuhan dunia kerja										
IKK 2.6.1.2	Persentase SMK yang menerapkan pembelajaran <i>link and match</i> dengan dunia kerja	%	6	24	36	48	1.882.645	1.943.049	2.005.140	Dit. SMK	Dapodik, Data Internal
IKP 2.6.2	Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	%	31,15	44,37	47,37	50,37	1.706.418	1.760.729	1.816.570	Ditjen Pendidikan Vokasi	Sakernas, BPS
6700; 6701; 4467	Pembinaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi; Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi; Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi										
SK	Meningkatnya lulusan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja										
IKK 2.6.2.1	Jumlah mahasiswa D1- D4/S1 Terapan yang memperoleh peningkatan kompetensi atau mendapat pengalaman di luar kampus	Orang	15.000	8.000	8.500	8.500	12.064	12.426	12.798	Dit Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi	Laporan internal
SK	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja										
IKK 2.6.2.2	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang memiliki pengalaman kerja atau tersertifikasi di industri	Orang	300	100	150	200	6.636	9.954	13.272	Dit Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi	Laporan internal



IKP 5.4.6	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	7	16	26	46	2.331.770	2.401.723	2.473.775	Ditjen Diksi	Keputusan Menteri PAN-RB,
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi										
SK	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi										
IKK 5.4.6.1	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	6	20	25	30	2.331.770	2.401.723	2.473.775	Setditjen Diksi	Laporan Internal

Rekapitulasi Usulan Kinerja dan Anggaran RKT Tahun 2023 - 2026

Previous 1 Next

Show all rows Column visibility Export

Search:

No	Nomenklatur	Kode	Nama Satker / Unit / Program / Kegiatan / KRO / Rincian Output / Komponen / Sumber Dana	Satuan	Volume	T.A. 2023	T.A. 2024		T.A. 2025		T.A. 2026	
						Alokasi	Volume	Alokasi	Volume	Alokasi	Volume	Alokasi
1	Satker	677591	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI			466.837.068		483.775.002		501.559.832		520.233.903
2	Unit	18	DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI			466.837.068		483.775.002		501.559.832		520.233.903
3	Program	18.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			338.758.676		355.696.610		373.481.440		392.155.511
4	Kegiatan	4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi			338.758.676		355.696.610		373.481.440		392.155.511
5	Sasaran	4466.01	Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi									
6	Indikator	4466.01.01	Persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II	%	10		10		10		10	
7	KRO	4466.BEI	Bantuan Lembaga	Lembaga	240	338.758.676	240	355.696.610	240	373.481.440	240	392.155.511
8	RO	4466.BEI.001	Dukungan Operasional PTN (BOPTN Vokasi)	Lembaga	46	101.413.200	46	106.483.860	46	111.808.053	46	117.398.456
9	Komponen	4466.BEI.001-004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			101.413.200		106.483.860		111.808.053		117.398.456
10	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			101.413.200		106.483.860		111.808.053		117.398.456
11	RO	4466.BEI.002	Layanan Pembelajaran (BOPTN Vokasi)	Lembaga	49	138.427.435	49	145.348.807	49	152.616.247	49	160.247.059
12	Komponen	4466.BEI.002-004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			138.427.435		145.348.807		152.616.247		160.247.059
13	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			138.427.435		145.348.807		152.616.247		160.247.059
14	RO	4466.BEI.003	Buku Pustaka (BOPTN Vokasi)	Lembaga	22	3.850.036	22	4.042.538	22	4.244.665	22	4.456.898
15	Komponen	4466.BEI.003-004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			3.850.036		4.042.538		4.244.665		4.456.898
16	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			3.850.036		4.042.538		4.244.665		4.456.898
17	RO	4466.BEI.004	Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN Vokasi)	Lembaga	45	37.945.944	45	39.843.241	45	41.835.403	45	43.927.173
18	Komponen	4466.BEI.004-004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			37.945.944		39.843.241		41.835.403		43.927.173
19	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			37.945.944		39.843.241		41.835.403		43.927.173
20	RO	4466.BEI.005	Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN Vokasi)	Lembaga	34	20.615.247	34	21.646.009	34	22.728.309	34	23.864.724
21	Komponen	4466.BEI.005-004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			20.615.247		21.646.009		22.728.309		23.864.724
22	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			20.615.247		21.646.009		22.728.309		23.864.724
23	RO	4466.BEI.006	Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN Vokasi)	Lembaga	44	36.506.814	44	38.332.155	44	40.248.763	44	42.261.201
24	Komponen	4466.BEI.006-004	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan			36.506.814		38.332.155		40.248.763		42.261.201



No	Nomenklatur	Kode	Nama Satker / Unit / Program / Kegiatan / KRO / Rincian Output / Komponen / Sumber Dana	Satuan	T.A. 2023		T.A. 2024		T.A. 2025		T.A. 2026	
					Volume	Alokasi	Volume	Alokasi	Volume	Alokasi	Volume	Alokasi
25	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			36.506.814		38.332.155		40.248.763		42.261.201
26	Program	18.WA	Program Dukungan Manajemen			128.078.392		128.078.392		128.078.392		128.078.392
27	Kegiatan	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi			128.078.392		128.078.392		128.078.392		128.078.392
28	Sasaran	4261.02	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi									
29	Indikator	4261.02.01	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	25		30		30		30	
30	Sasaran	4261.03	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi									
31	Indikator	4261.03.01	Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	79,75		96		96		96	
32	KRO	4261.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	2	128.078.392	2	128.078.392	2	128.078.392	2	128.078.392
33	RO	4261.EBA.962	Layanan Umum	Layanan	1	72.292.795	1	72.292.795	1	72.292.795	1	72.292.795
34	Komponen	4261.EBA.962-051	Penyusunan Penelaahan dan Revisi Program dan Anggaran			5.444.566		5.444.566		5.444.566		5.444.566
35	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			5.444.566		5.444.566		5.444.566		5.444.566
36	Komponen	4261.EBA.962-052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Anggaran dan Kegiatan			4.282.084		4.282.084		4.282.084		4.282.084
37	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			4.282.084		4.282.084		4.282.084		4.282.084
38	Komponen	4261.EBA.962-053	Pengelolaan Data dan Informasi			7.615.126		7.615.126		7.615.126		7.615.126
39	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			7.615.126		7.615.126		7.615.126		7.615.126
40	Komponen	4261.EBA.962-054	Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan			5.400.019		5.400.019		5.400.019		5.400.019
41	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			5.400.019		5.400.019		5.400.019		5.400.019
42	Komponen	4261.EBA.962-055	Pelayanan Pengelolaan BMN			3.264.809		3.264.809		3.264.809		3.264.809
43	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			3.264.809		3.264.809		3.264.809		3.264.809
44	Komponen	4261.EBA.962-056	Pelayanan Hukum dan Kepatuhan Internal			6.250.462		6.250.462		6.250.462		6.250.462
45	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			6.250.462		6.250.462		6.250.462		6.250.462
46	Komponen	4261.EBA.962-057	Organisasi dan Tata Laksana			3.379.411		3.379.411		3.379.411		3.379.411
47	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			3.379.411		3.379.411		3.379.411		3.379.411
48	Komponen	4261.EBA.962-058	Pengadaan Penataan dan Peningkatan Kompetensi Pegawai			4.080.653		4.080.653		4.080.653		4.080.653
49	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			4.080.653		4.080.653		4.080.653		4.080.653
50	Komponen	4261.EBA.962-059	Pelayanan Umum			1.579.302		1.579.302		1.579.302		1.579.302
51	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			1.579.302		1.579.302		1.579.302		1.579.302

No	Nomenklatur	Kode	Nama Satker / Unit / Program / Kegiatan / KRO / Rincian Output / Komponen / Sumber Dana	Satuan	T.A. 2023		T.A. 2024		T.A. 2025		T.A. 2026	
					Volume	Alokasi	Volume	Alokasi	Volume	Alokasi	Volume	Alokasi
52	Komponen	4261.EBA.962-060	Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Instansi/Lembaga			5.740.090		5.740.090		5.740.090		5.740.090
53	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			5.740.090		5.740.090		5.740.090		5.740.090
54	Komponen	4261.EBA.962-061	Pelayanan Humas dan Protokoler			16.588.543		16.588.543		16.588.543		16.588.543
55	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			16.588.543		16.588.543		16.588.543		16.588.543
56	Komponen	4261.EBA.962-063	Ketatausahaan			6.142.530		6.142.530		6.142.530		6.142.530
57	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			6.142.530		6.142.530		6.142.530		6.142.530
58	Komponen	4261.EBA.962-064	Pembinaan BLU dan PTNBH			2.525.200		2.525.200		2.525.200		2.525.200
59	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			2.525.200		2.525.200		2.525.200		2.525.200
60	RO	4261.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	55.785.597	1	55.785.597	1	55.785.597	1	55.785.597
61	Komponen	4261.EBA.994-001	Gaji dan Tunjangan			16.574.487		16.574.487		16.574.487		16.574.487
62	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			16.574.487		16.574.487		16.574.487		16.574.487
63	Komponen	4261.EBA.994-002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			39.211.110		39.211.110		39.211.110		39.211.110
64	Sumber Dana	A	RUPIAH MURNI			39.211.110		39.211.110		39.211.110		39.211.110



**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi**  
**Dengan**  
**Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Wartanto**

**Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Wikan Sakarinto**

**Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 28 Maret 2022

**Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

**Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi**



**Wikan Sakarinto**



**Wartanto**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya pemerataan kesempatan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi	[IKK 1.1] Persentase mahasiswa DI-DIV/ SI Terapan di PTN (vokasi) kelompok UKT I dan II	10
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	[IKK 2.1] Persentase satker di Ditjen Pendidikan Vokasi yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	66.46
		[IKK 2.2] Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi yang diusulkan mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM	20

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 110.036.352.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 110.036.352.000</b>

Jakarta, 28 Maret 2022

**Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi**

**Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi**



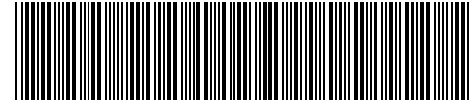
**Wikan Sakarinto**



**Wartanto**



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : SP DIPA- 023.18.1.677591/2022**



DS:3337-9362-1384-0203

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2. Unit Organisasi : (18) Ditjen Pendidikan Vokasi
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (677591) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI
- Sebesar : Rp. 110.036.352.000 ( SERATUS SEPULUH MILIAR TIGA PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH DUA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

10 PENDIDIKAN  
10.06 PENDIDIKAN TINGGI

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
023.18.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 110.036.352.000
023.18.WA.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 110.036.352.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	110.036.352.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN JAKARTA III (088) Rp. 110.036.352.000

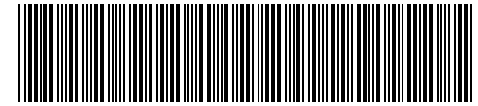
**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 023.18.1.677591/2022  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3337-9362-1384-0203

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Unit Organisasi : (18) Ditjen Pendidikan Vokasi  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (677591) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Halaman : I A. 1

Program	:	023.18.WA	Program Dukungan Manajemen			110.036.352.000
Kegiatan	:	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi			110.036.352.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB			
		2. 02	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM			
		3. 03	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93			
Klasifikasi Rincian Output	1 :	4261.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan	110.036.352.000
Rincian Output	:	01	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan	54.250.755.000
		02	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	55.785.597.000

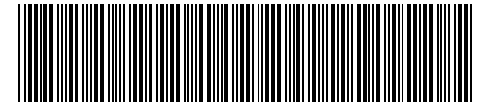
Jakarta, 17 November 2021

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.

Ir. Suharti, M.A., Ph.D.  
NIP 196911211992032002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 023.18.1.677591/2022**



DS:3337-9362-1384-0203

**I B. SUMBER DANA**

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Unit Organisasi : (18) Ditjen Pendidikan Vokasi  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (677591) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

1. Anggaran Tahun 2022	Rp.	110.036.352.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
1. Rupiah Murni	Rp.	110.036.352.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0	
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0	
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 023.18.1.677591/2022  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3337-9362-1384-0203

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Unit Organisasi : (18) Ditjen Pendidikan Vokasi  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (677591) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
677591	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI	16.574.487	93.461.865	-	-	-	110.036.352		
023.18.WA	Program Dukungan Manajemen	16.574.487	93.461.865	-	-	-	110.036.352		
4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	16.574.487	93.461.865	-	-	-	110.036.352		
4261.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	16.574.487	93.461.865	-	-	-	110.036.352	01 . 51	
01	RM	16.574.487	93.461.865	-	-	-	110.036.352	088@	
<b>JUMLAH</b>		<b>16.574.487</b>	<b>93.461.865</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>110.036.352</b>		

Jakarta, 17 November 2021  
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.  
Ir. Suharti, M.A., Ph.D.  
NIP 196911211992032002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 023.18.1.677591/2022  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3337-9362-1384-0203

Kementerian Negara/Lembaga : (023) KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Unit Organisasi : (18) Ditjen Pendidikan Vokasi  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode>Nama Satker : (677591) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	677591	<b>SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI</b>														
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	3.029.451	5.833.307	8.637.163	10.506.401	11.666.615	11.666.615	10.506.401	10.506.401	10.506.401	10.506.401	10.506.401	10.506.401	6.164.797	110.036.352
		<b>BELANJA PEGAWAI</b>	1.160.214	1.160.214	1.160.214	1.160.214	2.320.428	2.320.428	1.160.214	1.160.214	1.160.214	1.160.214	1.160.214	1.160.214	1.491.704	16.574.487
		<b>BELANJA BARANG</b>	1.869.237	4.673.093	7.476.949	9.346.187	9.346.187	9.346.187	9.346.187	9.346.187	9.346.187	9.346.187	9.346.187	9.346.187	4.673.093	93.461.865
	023.18.WA.4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	3.029.451	5.833.307	8.637.163	10.506.401	11.666.615	11.666.615	10.506.401	10.506.401	10.506.401	10.506.401	10.506.401	10.506.401	6.164.797	110.036.352
		51 BELANJA PEGAWAI	1.160.214	1.160.214	1.160.214	1.160.214	2.320.428	2.320.428	1.160.214	1.160.214	1.160.214	1.160.214	1.160.214	1.160.214	1.491.704	16.574.487
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.869.237	4.673.093	7.476.949	9.346.187	9.346.187	9.346.187	9.346.187	9.346.187	9.346.187	9.346.187	9.346.187	9.346.187	4.673.093	93.461.865

Jakarta, 17 November 2021  
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.  
Ir. Suharti, M.A., Ph.D.  
NIP 196911211992032002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 023.18.1.677591/2022  
IV A. B L O K I R**



DS:3337-9362-1384-0203

Kementerian Negara/Lembaga : [023] KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Unit Organisasi : [18] Ditjen Pendidikan Vokasi  
Provinsi : [01] DKI JAKARTA  
Kode dan Nama Satker : [677591] SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
<b>677591</b>	<b>SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI</b>		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 10.818.223		
	52 Belanja Barang Rp. 10.818.223		
<b>023.18.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>		
<b>4261</b>	<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi</b>		
<b>4261.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>		
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 818.232		
	Masih memerlukan dokumen pendukung sebagai dasar pengalokasian		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	521211 Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.281.746		
	Masih memerlukan dokumen pendukung sebagai dasar pengalokasian		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.699.938		
	Masih memerlukan dokumen pendukung sebagai dasar pengalokasian		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 120.000		
	Masih memerlukan dokumen pendukung sebagai dasar pengalokasian		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.898.307		
	Masih memerlukan dokumen pendukung sebagai dasar pengalokasian		
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		

Jakarta, 17 November 2021  
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.  
Ir. Suharti, M.A.,Ph.D.  
NIP 196911211992032002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2022  
NOMOR : DIPA- 023.18.1.677591/2022  
IV B. C A T A T A N**



DS:3337-9362-1384-0203

Kementerian Negara/Lembaga : [023] KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Unit Organisasi : [18] Ditjen Pendidikan Vokasi  
Provinsi : [01] DKI JAKARTA  
Kode dan Nama Satker : [677591] SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021  
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

ttd.  
Ir. Suharti, M.A., Ph.D.  
NIP 196911211992032002



SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725061, Faksimile (021) 5725484  
[www.vokasi.kemdikbud.go.id](http://www.vokasi.kemdikbud.go.id)